

# Modal Historis Pendidikan Politik dalam Pembangunan Bangsa

Iyep Candra Hermawan<sup>1</sup>

---

## Abstract

*Political education have significant mean and role to develop of nation state. Fundamental values has to done and practicing in our life. Nation and character building can be develop if everyone as a citizen knowing the rights and duties of citizen. Historical capital suc as Sumpah Pemuda and declaration of independence (proklamasi) is one of the greates moment to national movement, that very important to show everyday, everywhere and every generation in order to develop nation and character building.*

**Keyword:** *Historical capital, Politic education, Nation building.*

*Pendidikan politik memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Nilai-nilai fundamental dan bersejarah yang tertanam sejak masa lalu dan telah mengukir kehidupan bangsa hingga masa kini, perlu diwariskan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, hal ini merupakan proses pendidikan dan nilai yang berharga dalam pembentukan kepribadian bangsa. Modal historis dalam pembentukan kepribadian bangsa yaitu Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan menjadi kekuatan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Modal historis tersebut merupakan nilai monumental yang harus terus dipupuk, dibangun, dan diwariskan kepada generasi bangsa agar tidak kehilangan jati diri bangsa dan sekaligus menjadi modal yang sangat “enerjik” dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa.*

**Kata Kunci:** *Modal historis, Pendidikan politik, Pembangunan bangsa.*

---

## Pendahuluan

Pendidikan politik di Indonesia telah mewarnai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan telah dijalankan bertahun-tahun lamanya, sejak masa lalu hingga masa kini dengan berbagai ragam warna politik yang menghiasinya, baik pendidikan politik pada pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Pendidikan politik pada saat menjelang kemerdekaan tidak dibangun secara formal layaknya seperti pendidikan di masa pasca-kemerdekaan. Pendidikan politik saat itu terbentuk atas dasar “kesadaran kolektif” dan “identitas kebangsaan” yang menguat untuk tujuan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pendidikan politik terbangun bermula dengan ketokohan individual dan kesadaran kolektif

melahirkan “organisasi kebangsaan” serta “organisasi politik” di masa itu.

Kesadaran kebangsaan merupakan nilai yang efektif dalam membangun kepribadian bangsa, yang mampu menyatukan komponen masyarakat dalam gerakan kebangsaan, kemudian dikenal dengan nama “kebangkitan nasional”. Pendidikan politik era menjelang kemerdekaan terdapat hubungan yang sinergis antara kebangkitan nasional, gerakan kepemudaan, dan tercetusnya kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi modal historis dalam pendidikan politik bangsa. Apa, bagaimana, dan mengapa dapat dipandang sebagai modal historis pendidikan politik? Fokus masalah tersebut menjadi hal menarik dan penting untuk dikaji karena amat erat dalam hubungannya dengan

---

<sup>1</sup> Drs. Iyep Candra Hermawan, M. Pd., Dosen Kopertis Wilayah IV dpk pada Prodi PPKn, FKIP Universitas Suryakencana Cianjur, HP. 081563522242, e-mail: FKIPUNJURCJR@yahoo.co.id

pembangunan bangsa, terutama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

### *Modal Historis Pendidikan Politik Indonesia*

Perkembangan sejarah telah mengukir kehidupan politik bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan politik bangsa Indonesia sebagaimana ditunjukkan ketika melawan kekuasaan penjajahan Belanda di masa lampau, yaitu **Kebangkitan Nasional 1908**, **Sumpah Pemuda 1928**, dan hingga melahirkan **Proklamasi Kemerdekaan 1945**, meskipun memang kita tidak dapat melupakan perjuangan para pahlawan sebelumnya. Ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa monumental menjelang kemerdekaan Indonesia yang dipandang sebagai modal historis terkait dengan pendidikan politik bangsa. Sejarah juga telah melukiskan pasca kemerdekaan hingga reformasi kini telah menghiasi wajah politik bangsa Indonesia. Karenanya, potret pendidikan politik bangsa Indonesia dapat ditelusuri berdasarkan fakta atau peristiwa dari sejarah kehidupan masa lalu hingga perkembangan kehidupan politik yang dijalani masa kini.

### **Kebangkitan Nasional**

Modal historis pertama, yaitu Kebangkitan Nasional. Nasionalisme Indonesia mulai terbangun rapih dan sistematis tampak berawal dari kebangkitan nasional. **George Mc Turnan Kahin** (1952) dalam bukunya "*Nationalism And Revolution In Indonesia*" dan buku tersebut telah diterjemahkan dengan judul "*Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*" (1995: 83) mengungkapkan bahwa pergerakan kebangsaan-kebudayaan pertama yang terorganisir dicetuskan antara tahun 1906 dan 1908 lewat usaha-usaha seorang pensiunan dokter Jawa, Mas Wahidin Soediro Hoesodo, yang berusaha meningkatkan bangsa Jawa lewat pengetahuan Barat maupun warisan kebudayaannya sendiri. Dalam pergerakannya, ia memperoleh bantuan dan dukungan dari putra para bangsawan yang belajar di sekolah

kedokteran di Batavia (sekarang Jakarta), yaitu Raden Soetomo dan Raden Goenawan Mangoenkusumo, yang di kemudian hari muncul sebagai pemimpin nasionalis terkemuka, maka pada bulan Oktober 1908, dibentuklah suatu organisasi yang diberi nama **Budi Oetomo edi Oetomo**. Hans van Miert (2003: 15,27) dalam bukunya "*Een Koel Hoofd en Een Warm Hart: Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indie, 1918-1930*" menyatakan bahwa Budi Oetomo edi Oetomo didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar STOVIA (sekolah kedokteran pribumi). Budi Oetomo edi Oetomo merupakan organisasi moderat terbesar dan paling berpengaruh dalam dasawarsa kedua dan ketiga abad lalu, yang membangkitkan semangat "nasionalisme". Di antara pendirinya terdapat orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin nasional yang terkenal, yaitu Raden Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan saudaranya Goenawan Mangoenkoesoemo. Mereka didesak oleh dokter Jawa Wahidin Soedirohoesodo yang telah menjelajahi berbagai kota di Jawa untuk mengajak membangkitkan bangsa Jawa. Taufik Abdullah (2001: 24, 28) dalam bukunya "*Nasionalisme dan Sejarah*" mengemukakan bahwa Budi Oetomo edi Oetomo merupakan organisasi modern yang pertama yang mendapat pengakuan kekuasaan kolonial. Sejak awal dilahirkan Budi Oetomo edi Oetomo merupakan organisasi yang bergerak untuk tujuan emansipatoris, yang ingin menaikkan harkat diri dan meninggalkan keterbelakangan. Sebagai refleksi historis "Kebangkitan Kebangsaan", ia menegaskan, dengan kesadaran, atau lebih tepat, pengetahuan, ini pulalah sebaiknya kita memang selalu merayakan "20 Mei 1908" sebagai "hari kebangkitan nasional".

Pendidikan politik Indonesia dilakukan sebagai suatu pembentukan "kesadaran kelompok". George Mc Turnan Kahin (1995: 49-54) mencatat bahwa "garis-garis batas politis cenderung menentukan kesadaran nasional". Kahin mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor terpenting yang mendukung dan mempengaruhi pertumbuhan nasionalisme Indo-

nesia. *Pertama*, pertumbuhan suatu nasionalisme terpadu adalah tingginya derajat **homogenitas agama** di Indonesia, yaitu lebih dari 90 persen penduduknya beragama Islam. Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa, tetapi ini benar-benar merupakan semacam simBudi Oetomo I kelompok – dalam (*in-group*) untuk melawan pengganggu asing dan penindas suatu agama yang berbeda. Hal ini berarti, homogenitas agama sebagai simBudi Oetomo I kelompok telah membangunkan kesatuan dan kesadaran nasional. Agama memberikan peranan penting ke arah kebangkitan dan penyatuan bangsa. Penegasan Wertheim (1999: 259) bahwa "... Islam sebagai isolasi pra-nasionalisme yang menyatukan, ... memberikan kontribusi terhadap perubahan reaksi pasif terhadap pengaruh Barat menjadi reaksi aktif nasionalisme Indonesia. *Kedua*, faktor integrasi penting lainnya adalah perkembangan *bahasa kesatuan* Hindia Kuno, bahasa Melayu Pasar, menjadi suatu **bahasa nasional**. Bahasa ini memasuki pasar dan membantu aliran Islam mematahkan kecenderungan orang Indonesia memiliki nasionalisme yang picik. Menurut Wertheim (1999: 6) bahwa pendidikan modern, walaupun masih pada tingkatan yang sangat dasar selama periode kolonial, telah menyebarkan pola pemikiran yang sama di berbagai wilayah yang jauh di kepulauan ini. Asal-usul bahasa Indonesia yang sama telah memberikan kontribusi dalam upaya membangun bahasa nasional. Bahasa Melayu, yang terutama digunakan di Sumatera serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, di sepanjang pantai Kalimantan dan di semenanjung Malaya, memberikan sumbangan terbesar bagi bahasa Indonesia ini. *Ketiga*, integrasi nasionalisme Indonesia biasanya dianggap sebagai akibat adanya *Volksraad* (**Majelis Rakyat**), majelis perwakilan tertinggi bagi seluruh Indonesia. Dengan adanya *Volksraad* berarti menyatukan semua orang Indonesia dari berbagai kepulauan dan membangunkan kesadaran mereka akan persoalan-persoalan dan hubungan dengan Belanda pada umumnya, serta cenderung mengembangkan suatu kesatuan yang lebih meyakinkan, yang menggabungkan nasionalisme

mereka secara lebih erat. Kenyataan tersebut juga seperti dikemukakan Hans van Miert (2003: 180) bahwa *Volksraad* memang untuk pertama kali menjadi podium nasional dari mana kaum nasionalis dapat mengungkapkan keluhan-keluhan dan keinginan-keinginannya. Hal inilah yang memperkuat ke arah memunculkan kebangkitan bangsa. *Keempat*, pertumbuhan dan persebaran nasionalisme dirangsang kuat oleh cara-cara penyebaran gagasan akibat berkembangnya suatu **surat kabar** yang memakai bahasa sehari-hari dan **radio**. Selain itu, juga terdorong oleh besarnya peningkatan mobilitas geografis penduduk dan gagasan-gagasan yang disebabkan oleh pola organisasi ekonomi abad ke 20 di Indonesia dan fasilitas-fasilitas transportasi yang menjadi konsekuensinya.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1994: 3) bahwa konsep nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip *kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian* selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan *tujuan politik*, maka dalam pergerakan nasional berkaitan dengan fokus masalah *kesadaran identitas, pembentukan solidaritas* lewat proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi.

Organisasi, dalam hal ini organisasi politik melalui perjuangan bangsa memegang peranan penting dan strategis dalam usaha mencapai tujuan politiknya. Perjuangan dan pergerakan nasional yang ditunjukkan oleh para pahlawan di masa lalu sering tersandung dan mengalami hambatan dan selalu dipatahkan ketika melawan pemerintahan kolonial Belanda, salah satu alasannya disebabkan kekuatan organisasi tidak cukup dibangun secara kekuatan fisik semata lewat peperangan dan pertumpahan darah dan keringat, tetapi juga harus dilandasi oleh bangunan organisasi yang rapih dan sistematis. Dalam perspektif ini, Sartono (1994: 4,6) menyatakan bahwa:

pembentukan organisasi pertama merupakan tonggak sejarah, bukan karena formatnya atau pun skala kegiatannya, tetapi kualitas komunikasi para pesertanya. Tidak

dapat diingkari bahwa dalam Budi Oetomo edi Oetomo (Budi Oetomo ) tertuang kebutuhan akan identitas dan solidaritas, lagi pula simBudi Oetomo lisasi kesadaran kolektifnya.....

Terbentuknya organisasi membuat “kesadaran kolektif” lebih tampak, sekaligus mempermudah proses-proses “kebersamaan” antara lain kebersamaan perspektif serta konsepsi terhadap kondisi masyarakat kolonial.....

Dipandang dari perspektif tersebut maka sangat bermakna pendirian Budi Oetomo pada 20 Mei 1908. Kesadaran kolektif telah menemukan momentum dengan pelembagaannya yang sangat instrumental dalam perkembangan aksi kolektif di suatu pihak dan di pihak lain bersifat ekspresif selaku manifestasi pencetus orientasi kolektif dalam menghadapi dominasi kolonial beserta diskriminasinya.

Kebangkitan nasional merupakan tonggak pertama penguatan pendidikan politik bangsa sekaligus memberikan pembelajaran politik yang berharga bagi bangsa Indonesia dan seharusnya tetap dipupuk dan diwariskan secara terus menerus kepada generasi bangsa agar tidak melupakan sejarahnya.

Kebangkitan nasional dapat dipandang sebagai tonggak pendidikan politik karena terdapat proses perjuangan bangsa untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda serta terdapat komunikasi dan sosialisasi politik yang dibangun dalam organisasi Budi Oetomo edi Oetomo. Terdapatnya indikasi muatan pendidikan politik, hal ini dapat terungkap dari penegasan Sartono (1994) yang membeberkan kesimpulan tentang Budi Oetomo sebagai berikut.

- a. Dalam menghadapi orde kolonial kaum terpelajar berhasil menimbulkan kesadaran akan lingkungan sosio-politik serta kesadaran diri.
- b. Kesadaran kolektif yang difokuskan pada ideologi nasionalisme dapat mengatasi identitas negatif untuk dijadikan identitas

kolektif sebagai simBudi Oetomo l solidaritas baru.

- c. Organisasi Budi Oetomo sebagai struktur solidaritas baru berfungsi untuk melaksanakan inovasi dan transformasi dari tradisionalisme serta komunalisme menjadi modernisme serta asosiasinya.
- d. Apabila Budi Oetomo sebagai organisasi merupakan bentuk institusionalisasi aktivitas menurut hubungan-hubungan sosial politik sesuai dengan masyarakat modern, jadi berfungsi secara instrumental, di samping itu Budi Oetomo juga berfungsi sangat ekspresif dalam pelbagai sentimen dan kepentingan golongan terpelajar sebagai protagonis nasionalisme.
- e. Meskipun pada umumnya Budi Oetomo secara formal tidak berorientasi pada nilai-nilai politik namun sebagai struktur asosiasi menciptakan ruang sosial dan arena politik yang di dalamnya terselenggara **sosialisasi politik**.
- f. Inheren dalam masyarakat pluralistik ialah adanya kesadaran diferensial berdasarkan perbedaan orientasi nilai, sikap, serta kepentingan, sehingga pendirian Budi Oetomo segera diikuti oleh pendirian pelbagai organisasi dengan beraneka ragam bentuk simBudi Oetomo lnya serta ideologinya.

Dengan demikian, meskipun organisasi Budi Oetomo edi Oetomo tidak berorientasi politik atau sebagai organisasi politik, namun segala aktivitasnya menunjukkan dan menciptakan ruang sosial politik bagi para warganya, terutama dalam bentuk sosialisasi politik yang dibangun.

### **Sumpah Pemuda**

Modal historis kedua dalam pendidikan politik bangsa yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan politik yang dikumandangkan pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928 dan hal ini dapat dipandang sebagai penyatuan dan kesadaran politik bangsa. Bersamaan dengan Sumpah Pemuda dan untuk pertama kalinya lagu “Indonesia Raya”

ciptaan Wage Rudolf Supratman diperdengarkan atau dikumandangkan yang disambut hadirin dengan tepuk tangan (Silalahi, 2001: 19). Hal ini makin memperkuat kesatuan dan kesadaran politik di kalangan generasi bangsa saat itu. Sumpah Pemuda sebagai peristiwa monemuntal yang mempengaruhi generasi bangsa di kalangan para pemuda Indonesia.

Seperti halnya Budi Oetomo edi Oetomo, dan Sumpah Pemuda bahkan dari keduanya terdapat benang historis yang menyambung dalam pembentukan nasionalisme, yaitu dari “nasionalisme kultural” ke “nasionalisme politik”. “Nasionalisme politik” adalah hasrat modern yang didorong oleh cita-cita untuk merintis hari depan, bukan untuk menggali-gali pusaka lama. Pernyataan tentang nasionalisme, mengutip pendapat Ernest Renan tentang bangsa sebagai perwujudan dari “*le desir d’etre ensemble*”. Bukankah “Sumpah Pemuda” adalah contoh *par excellence* dari teori yang sangat sederhana ini? “Bangsa” dan “tanah air” bukanlah sesuatu telah jadi begitu saja, tetapi bertolak dari pengakuan dan perjanjian – hasil dari sebuah pergolakan intelektual yang disengaja (Abdullah, 2001: 34).

Dalam perspektif historis, mengapa bahwa 28 Oktober 1928 dirayakan sebagai “Sumpah Pemuda” dan mendapatkan salah satu tempat yang strategis dalam kesadaran sejarah bangsa. Menurut Abdullah (2001: 50) bahwa peristiwa “Sumpah Pemuda” secara simBudi Oetomo lik dianggap sebagai terpatrikannya secara resmi ‘kehendak akan bersatu’. Sumpah Pemuda bahkan telah menjadi salah satu *myth of concern* bangsa yang harus dijaga.

Penegasan lain dikemukakan Suratman (2008: 57) bahwa “prinsip persatuan” yang tergemBudi Oetomo k dalam janji itu memang terumus secara sederhana, “**satu nusa, satu bangsa, satu bahasa**”, namun implikasinya kompleks dan fundamental.

*Pertama*, ujung final dari arah bersama yang akan ditempuh adalah sebuah rumah kebangsaan baru bernama Indonesia.

*Kedua*, menilik peserta ikrarnya yang begitu lengkap dan beragam, tentu ada saling

pengakuan di antara mereka bahwa eksistensi khas masing-masing (golongan, daerah, kepercayaan, aliran politik, budaya, dsb) akan memperoleh tempat yang terhormat di rumah baru bernama Indonesia.

*Ketiga*, jika proses perumusan ikrar tersebut ditilik, sudah pasti di sana terdapat pengakuan bersama bahwa tempat terhormat untuk masing-masing komponen penyusun bangsa itu tidak berwatak bertingkat-tingkat tetapi setara dan sejajar.

*Keempat*, dari proses itu pula, dapat disimpulkan adanya pembayangan bersama di antara para peserta bahwa di rumah Indonesia nanti keputusan-keputusan nasional akan diambil berdasarkan kompromi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara historis, peranan pemuda telah mengukir peristiwa monumental bagi Bangsa Indonesia, mereka mampu mempersatukan berbagai latar belakang “adat, budaya, bahasa, golongan, daerah, kepentingan politik, dan sejenisnya” dalam kesatuan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memiliki makna yang penting, berarti, dan berpengaruh dalam kaitannya dengan perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan.

### **Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**

Modal historis ketiga dalam pendidikan politik bangsa yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Meraih Proklamasi Kemerdekaan tidak dengan begitu mudah dicapai oleh bangsa Indonesia, tetapi dilakukan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Bertahun bahkan berabad lamanya kita berharap untuk memperoleh kemerdekaan, namun belum juga kunjung tiba. Karenanya, M. Soebadijo mengungkapkan tentang “*Nasionalisme syarat ke Indonesia Merdeka*” yang dimuat dalam “*Tjahaja, 12 Mei 1945*” bahwa: “Dan satu-satunya syarat atau jalan untuk menanam semangat merdeka di dalam hati sanubari rakyat, ialah menyuburkan Nasionalisme, menyuburkan

keinsyafan, Kebangsaan di kalangan Rakyat. Karena nasionalisme-lah yang menjadi Semangat, dan pokoknya semangat yang tak bernyawa ialah semangat yang mati. Di dalam kesadaran nasional inilah letaknya daya yang nanti bisa membuka kenikmatannya hari kemudian.

Kita karenanya menyuburkan dan memelihara nasionalisme itu, dari Nasionalisme yang kurang hidup dibikin menjadi nasionalisme yang hidup, pendeknya dari nasionalisme yang negatif (kosong), dibikin nasionalisme yang positif (berisi)... Kami yakin, "Dengan tiada Nasionalisme tidak ada kemajuan. Dengan tiada Nasionalisme tidak ada Bangsa dan tidak ada Kemerdekaan" (Darmosugito, 1982: 114, 116).

Perjalanan panjang untuk mencapai "kemerdekaan Indonesia" telah dilakukan oleh rakyat dan pejuang bangsa bertahun dan bahkan berabad lamanya. Kata kunci kesuksesan untuk meraih kemerdekaan karena dibangun melalui semangat "kebangsaan dan perjuangan", yaitu semangat persatuan dan kesatuan, semangat pergerakan dan pengorbanan demi bangsa.

Sebuah pencerminan kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Dengan perjuangan yang tiada hentinya, barulah kemudian kemerdekaan Indonesia diraih saat yang tepat, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum Proklamasi dibacakan, Bung Karno menyampaikan pidato singkat dan pada bagian pidato akhir menyatakan, "Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya". Selanjutnya membacakan teks Proklamasi seperti tampak berikut di bawah ini (Poesponegoro & Notosusanto, 2008: 152; Silalahi, 2001: 193-194).

## PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan

dengan tjara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 Budi Oetomo  
elan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia  
Soekarno/Hatta

(tanda tangan Soekarno)

(tanda tangan Hatta)

Setelah membacakan Proklamasi, kemudian Bung Karno menegaskan: "Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insyallah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu".

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa monumental yang sangat penting dan menentukan atas keberadaan bangsa dan pengakuan diri dalam masyarakat Internasional. Menurut Mardojo (1991: 144) bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bila ditinjau lebih lanjut, ternyata mengandung beberapa aspek, yaitu:

- a. dari sudut ilmu hukum, proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa indonesia di atas telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga diganti dengan suatu tata hukum nasional (indonesia);
- b. dari sudut politis-ideologis, proklamasi berarti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu

penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas merdeka dan berdaulat penuh.

Ikatan Sumpah Pemuda telah mempengaruhi pada kesadaran berpolitik bangsa untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Proklamasi dikumandangkan, bendera sang Merah Putih dipancangkan dan bersamaan pula dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Gemuruh Kemerdekaan Bangsa Indonesia menyelimuti masyarakat Indonesia yang memang telah dicita-citakan dari sejak masa lampau. Karena itu, faktor yang menjadi pemersatu bangsa diikat oleh perekat kepemilikan "**bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya**". Hal ini telah memberikan penanaman nilai moral sekaligus menjadi pendidikan politik bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Bangsa mana pun di dunia memiliki atribut tersebut dan menjadi *moral force* dalam mengikat kesatuan warga. Secara tidak langsung menjadi pendidikan politik bagi bangsanya masing-masing. Atribut kebangsaan tersebut menjadi perekat warga dalam melawan tindakan tak manusiawi dari kaum penjajah.

Radja Tjantik menyatakan pentingnya atribut kebangsaan untuk kemerdekaan yang dimuat pada "*Asia Raya, 7 April 1945*" (Darmosugito, 1982: 55) yaitu:

"(1) **bendera**, (2) **lagu kebangsaan**, (3) **bahasa persatuan**, dan (4) **tanah air**".

Ini lah lambang persatuan yang selalu ada pada bangsa yang merdeka. Jikalau salah satu dari yang empat itu tak ada, maka tak dapatlah bangsa itu merdeka dengan sebenarnya.

Sefelah kita memiliki si dua warna dan lagu "Indonesia Raya" kembali dari tangan saudara Tua, maka darah kita yang 300 tahun lamanya dingin membeku itu segeralah menjadi panas.

Tetapi mengapakah tinggal panas saja, mengapa tiada mendidih? Bukankah yang kita harapkan supaya darah kita mendidih, supaya

dapat menggelak dan melimpah sehingga membasahi tanah air kita?

"Mengapa darah tiada mendidih?" itu pertanyaan kita.

"Di manakah dicari api untuk mendidihkan darah?"

Bahasa Indonesia, bahasa persatuan, itulah api yang dahsyat!

Pengikat kesatuan bangsa diperkokoh oleh kepemilikan dasar negara dan konstitusi yang telah dilahirkan dan disepakati. **Pancasila** sebagai dasar negara dan **UUD 1945** sebagai konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 menjadi pedoman dalam mengatur kenegaraan dan pemerintahan. Bagaimana bangunan negara dibentuk, lembaga pemerintahan dimiliki, dan tujuan negara ingin dicapai? Hal ini merupakan pendidikan politik bangsa yang seharusnya ditanamkan dan diwariskan kepada warga negara agar mereka bisa memahami, menyadari, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian budaya demokratis bisa ditegakkan.

#### *Pembangunan Bangsa (Character Building)*

Bahwa pembangunan bangsa harus menjadi komitmen negara-bangsa (*nation-state*). Suatu negara didirikan bertujuan untuk pembangunan bangsa yaitu pembangunan yang diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk "... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*". Hal ini berarti bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang berencana dan terarah yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau bangsa untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Pembangunan yang diarahkan

pada pengembangan fisik material maupun peningkatan mental spiritual. Pembangunan bangsa berarti pembangunan yang dijiwai landasan konstitusional dan diarahkan agar bangsa memperoleh kemajuan dan kesejahteraan.

Pembangunan bangsa juga berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kepribadian dan karakter bangsa. Prinsip yang mendasari kebangsaan (nasionalisme) seperti dikemukakan Kartodirdjo (1999: 15, 21) adalah “kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*)”. Pembangunan bangsa berlandaskan pada nilai-nilai atau prinsip nasionalisme dan hal tersebut menunjukkan identitas “kemartabatan bangsa”.

Pembangunan bangsa berkaitan dengan pembangunan akhlak atau pembentukan karakter. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa ada tujuh dosa besar di dunia berikut di bawah ini.

- (1) Kaya tanpa kerja (*wealth without work*).
- (2) Kesenangan tanpa kata/suara hati (*pleasure without conscience*).
- (3) Pengetahuan tanpa karakter (*knowledge without character*).
- (4) Perdagangan tanpa moral (*commerce without morality*).
- (5) Ilmu tanpa kemanusiaan (*science without humanity*).
- (6) Ibadah tanpa pengorbanan (*worship without sacrifice*).
- (7) Politik tanpa prinsip (*politics without principle*) (Hidayatullah, 2010: 9).

Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah “karya, pengetahuan, perdagangan, ilmu, ibadah, dan politik” dipandang menjadi tidak berarti bagi manusia dan kehidupannya apabila tanpa diimbangi dan dicerminkan dalam wujud makna dan nilai yang dapat dirasakan oleh mereka serta dengan mendasarkan pada prinsip dan nilai moral yang ditetapkan dalam aturan kenegaraan maupun yang diajarkan dalam agama. Artinya

pembangunan bangsa harus memperhatikan dan mengindahkan pada nilai-nilai dasar keakhlakan. Sesungguhnya Rasul diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan keluhuran akhlak (HR Ahmad). Hal ini berarti bangsa yang bermartabat ditunjukkan dengan keluhuran akhlaknya yang mulia, kepribadiannya yang terpuji.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tentu saja, pembangunan bangsa yang dijalankan Pemerintahan Indonesia melalui gerakan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi tersebut. Pembangunan bangsa melalui gerakan pendidikan dalam upaya mengarahkan, membentuk, dan mewujudkan peserta didik atau warga negara yang “beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab”. Melalui gerakan pendidikan tersebut diharapkan menjadi bangsa yang berkepribadian dan bermartabat.

## Penutup

Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, kita tidak Budi Oetomo leh melupakan sejarah. Artinya kita tidak Budi Oetomo leh melupakan “modal historis” pendidikan politik bangsa, yaitu Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Modal historis tersebut merupakan nilai-nilai monumental dalam pembentukan dan pembangunan bangsa. Teringat akan kata-kata Presiden pertama RI Soekarno yang menegaskan bahwa “Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah)”. Hal ini dipandang sangat penting untuk bercermin pada kehidupan masa lalu. Nasionalisme,

patriotisme, keteladanan dan ketokohan bangsa, dan kesadaran kolektif merupakan nilai-nilai fundamental yang telah dibangun oleh pejuang atau pahlawan masa lalu dan seharusnya menjadi cermin, teladan, dan perwujudan bagi generasi bangsa masa kini serta masa mendatang.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik, 2001, *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Alfian, 1986, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Darmosugito, Pitoyo, 1982, *Menjelang Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayatullah, Furqon, 2010, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kahin, George Mc Turnan, 1952, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Terjemahan. Jakarta: UNS Bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung: Mandar Maju.
- Kartodirdjo, Sartono, 1994, *Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Kartodirdjo, Sartono, 1999, *Multidimensi Pembangunan Bangsa; Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Miert, Hans van, 2003, *Dengan Semangat Berkobar; Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Terjemahan, Jakarta: KITLV-Hasta Mitra-Pustaka Utan Kayu.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi, S, 2001, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suratman, Tono, 2008, *Patriotisme Semangat Bela Negara*, Budi Oetomo gor: LPKN.
- Wertheim, W.F, 1999, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.